

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, peningkatan output yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi, peningkatan produktivitas, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menunjukkan bahwa suatu daerah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan produktif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan (Simangunsong et al., 2023)

Studi empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil memiliki hubungan positif dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan. Hubungan ini tercermin melalui peningkatan pendapatan per kapita, perluasan kesempatan kerja, serta akses yang lebih baik terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (Sharma, 2014). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan intervensi pembangunan yang bersifat produktif dan inklusif. Selain itu, stabilitas pertumbuhan ekonomi menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, yang

pada akhirnya mendorong investasi dan memperluas basis ekonomi daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak hanya berdampak pada peningkatan output, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan (van Niekerk, 2022)

Dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya ekonomi secara mandiri. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mempercepat pembangunan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Salah satu instrumen utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan daerah untuk membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan (Tuti Dharmawati et al., 2024). Namun demikian, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bervariasi, sehingga berdampak pada perbedaan kinerja ekonomi antar wilayah.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat

mencapai sekitar 14–15 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, menjadikannya sebagai salah satu kontributor terbesar di Indonesia. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu mencapai 48,27 juta jiwa pada tahun 2020 dan mendekati 50 juta jiwa pada tahun 2024. Besarnya jumlah penduduk tersebut mencerminkan potensi pasar tenaga kerja sekaligus permintaan agregat yang tinggi.

Dari sisi struktur ekonomi, perekonomian Jawa Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi lebih dari 40 persen terhadap PDRB, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa (Arifien et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Barat berperan sebagai pusat industri dan perdagangan nasional yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Namun demikian, dinamika pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berikut merupakan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama periode 2013–2025:

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2025

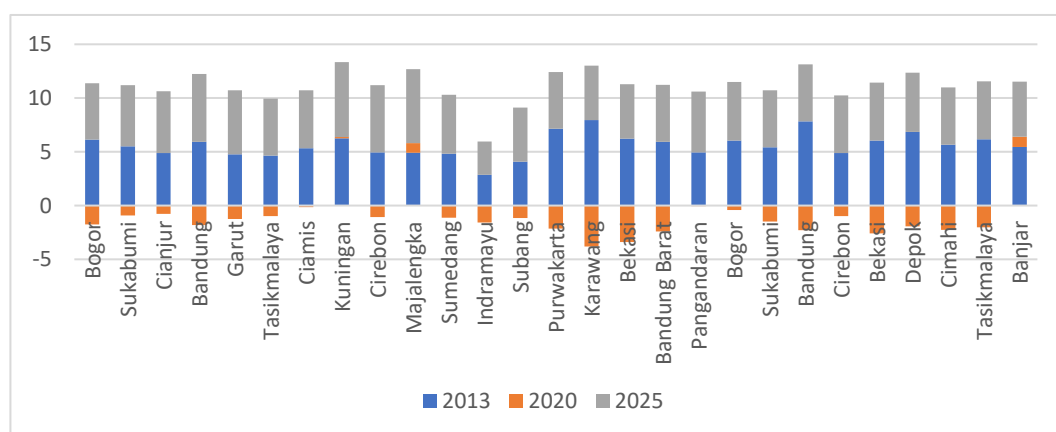
Tahun	LPE (%)
2013	6.33
2020	-2.52
2025	5.32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Provinsi Jawa Barat menunjukkan dinamika yang fluktuatif sepanjang periode penelitian. Pada tahun 2013 sebagai awal periode, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sebesar 6,33 persen yang mencerminkan kondisi ekonomi yang

relatif kuat dan stabil. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -2,52 persen akibat pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Penurunan ini terutama terjadi pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi yang merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Jawa Barat. Selanjutnya, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami pemulihan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,32 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi global dan domestik.

Data tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kapasitas fiskal daerah dan tenaga kerja, maupun faktor eksternal seperti krisis global. Apabila dianalisis lebih lanjut pada tingkat kabupaten dan kota, terlihat adanya disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten/kota di Jawa Barat untuk tiga periode waktu (2013, 2020, dan 2025)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2025 (%)

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dilihat dari persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, terlihat adanya disparitas yang cukup signifikan antar wilayah. Pada tahun 2013 sebagai representasi kondisi awal, sebagian besar kabupaten/kota mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, bahkan beberapa daerah seperti Karawang (7,96%), Purwakarta (7,15%), dan Depok (6,85%) menunjukkan kinerja ekonomi yang sangat kuat. Namun, pada tahun 2020 hampir seluruh daerah mengalami kontraksi ekonomi, dengan penurunan terdalam terjadi di Karawang (-3,8%), Bekasi (-3,39%), dan Bandung Barat (-2,41%). Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan basis industri yang kuat cenderung lebih terdampak oleh guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19.

Memasuki tahun 2025 sebagai gambaran kondisi terkini, seluruh kabupaten/kota kembali menunjukkan tren pemulihan dengan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan tingkat yang bervariasi. Beberapa daerah seperti Kuningan (6,98%), Majalengka (6,86%), dan Kabupaten Bandung (6,32%) mencatat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemulihan ekonomi antar daerah tidak seragam dan dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi serta kapasitas sumber daya masing-masing wilayah.

Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemulihan ekonomi antar daerah tidak seragam dan dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi serta kapasitas sumber daya masing-masing wilayah. Dalam konteks ini,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, sementara tenaga kerja merepresentasikan kapasitas produksi yang secara langsung memengaruhi output ekonomi (Riyadi & Woyanti, 2022). Oleh karena itu, kedua faktor tersebut diduga memiliki peran signifikan dalam menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama yang secara langsung mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah (Usman, 2017). Pajak daerah dipungut berdasarkan kewenangan pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung, sehingga bersifat lebih fleksibel dalam penggunaannya untuk membiayai pembangunan. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan pemanfaatan layanan publik di suatu wilayah (Dewantoro, 2022). Kedua komponen ini dipilih karena memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas ekonomi lokal serta relatif lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dibandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lebih lanjut, penelitian ini memfokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai bagian dari pajak daerah karena jenis pajak ini memiliki basis objek yang jelas dan stabil, yaitu tanah dan bangunan, yang mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi dan nilai aset suatu daerah (Utami & Wicaksono, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) juga merupakan salah satu penyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak kabupaten/kota serta memiliki tingkat ketersediaan data yang relatif konsisten dalam periode penelitian (Permatasari & Wicaksono, 2022).

Di sisi lain, retribusi daerah difokuskan pada retribusi pasar karena mampu merepresentasikan aktivitas perdagangan masyarakat secara langsung, khususnya pada sektor informal yang dominan di tingkat daerah. Retribusi pasar mencerminkan intensitas interaksi ekonomi harian, sehingga dapat menjadi indikator yang relevan dalam melihat dinamika ekonomi lokal (Kotib, 2020). Dengan demikian, pemilihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan retribusi pasar diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai peran kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, berikut disajikan data sampel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi pasar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 2 Penerimaan PBB-P2 dan Retribusi Pasar di Beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Miliar Rupiah)

Daerah	PBB-P2			Retribusi Pasar		
	2013	2020	2025	2013	2020	2025
Kab. Bekasi	231,89	552,34	850,00	11,23	14,76	24,00
Kab. Karawang	114,34	305,67	520,00	8,54	11,23	18,20

Kota Bandung	284,56	605,78	915,00	10,85	13,50	20,80
Kab. Ciamis	14,89	34,56	53,50	2,84	3,65	5,80
Kota Banjar	4,12	10,84	17,50	0,35	1,65	2,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas, diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi pasar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode 2013–2025. Daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kota Bandung memiliki nilai penerimaan yang relatif besar dibandingkan daerah lainnya. Sebagai contoh, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bekasi meningkat dari sekitar 231,89 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 850,00 miliar rupiah pada tahun 2025. Pola serupa juga terlihat pada Kota Bandung yang mengalami peningkatan dari 284,56 miliar rupiah menjadi 915,00 miliar rupiah.

Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor properti dan perdagangan. PBB-P2 yang berbasis pada nilai tanah dan bangunan menunjukkan bahwa daerah dengan perkembangan wilayah yang pesat cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar. Sementara itu, retribusi pasar mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung, khususnya pada sektor perdagangan dan UMKM yang menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

Namun demikian, tingginya penerimaan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal semata, melainkan juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan dinamika tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. Aktivitas ekonomi yang tinggi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang memadai untuk mendukung proses produksi dan distribusi. Oleh karena itu, untuk memahami lebih komprehensif dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dianalisis pula kondisi tenaga kerja, khususnya jumlah angkatan kerja di masing-masing kabupaten/kota.

**Table 1.3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Beberapa Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat (Jiwa)**

Daerah	2013	2020	2025
Kab. Bekasi	1.341.209	1.847.709	2.068.400
Kab. Karawang	986.352	1.162.633	1.228.100
Kota Bandung	1.118.534	1.316.530	1.465.200
Kab. Ciamis	572.634	649.792	672.100
Kota Banjar	81.323	88.212	96.400

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung sebagai wilayah dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi memiliki jumlah angkatan kerja yang besar dan terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2025. Kabupaten Karawang juga menunjukkan jumlah angkatan kerja yang relatif tinggi, meskipun tidak sebesar kedua wilayah tersebut. Sebaliknya,

Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar memiliki jumlah angkatan kerja yang lebih rendah, dengan pertumbuhan yang cenderung lebih terbatas.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapasitas tenaga kerja antar daerah tidak merata, yang berimplikasi pada perbedaan kemampuan dalam menghasilkan output ekonomi. Daerah dengan jumlah angkatan kerja yang besar memiliki potensi produksi yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan jumlah angkatan kerja yang terbatas menghadapi keterbatasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, variasi jumlah angkatan kerja tersebut semakin menegaskan pentingnya variabel tenaga kerja dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Jika dicermati lebih lanjut, pola yang muncul dari data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan keterkaitan antara kapasitas fiskal daerah dan ketersediaan tenaga kerja dalam membentuk dinamika ekonomi wilayah. Daerah dengan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan retribusi pasar yang relatif tinggi umumnya juga diikuti oleh jumlah angkatan kerja yang lebih besar, yang mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang lebih berkembang. Sebaliknya, daerah dengan penerimaan yang relatif terbatas cenderung memiliki kapasitas tenaga kerja yang lebih kecil, sehingga ruang dalam mendorong aktivitas ekonomi menjadi lebih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan serta ketersediaan tenaga kerja berjalan secara beriringan dalam mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, tetapi juga oleh variasi jumlah angkatan kerja serta kapasitas fiskal daerah yang tercermin dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah dengan jumlah angkatan kerja besar dan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan tenaga kerja dan rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghadapi kendala dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, analisis yang mengintegrasikan variabel tenaga kerja dari sisi kuantitas serta unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah menjadi penting untuk memahami secara komprehensif dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pendekatan fungsi produksi *Cobb-Douglas*. Dalam model ini, output ekonomi merupakan fungsi dari input produksi, yaitu modal dan tenaga kerja (Riyadi & Woyanti, 2022). Dalam konteks penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai representasi dari modal fiskal daerah, sedangkan angkatan kerja sebagai input tenaga kerja. Kombinasi antara kedua faktor tersebut akan menentukan tingkat output yang dihasilkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi publik, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga

kerja. Dengan demikian, interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mengoptimalkan kedua faktor tersebut secara bersamaan. Di Provinsi Jawa Barat, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kapasitas fiskal dan jumlah angkatan kerja antar kabupaten/kota. Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung mengalami keterbatasan dalam mendorong aktivitas ekonomi. Demikian pula dengan angkatan kerja, daerah dengan jumlah tenaga kerja yang besar belum tentu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan agregat tanpa mengkaji komponen spesifik seperti pajak daerah dan retribusi daerah (Wahyudi Susanto & Catur Sugianto, 2019). Selain itu, penelitian mengenai tenaga kerja umumnya lebih menekankan pada aspek kualitas, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan, dibandingkan dengan aspek kuantitas (Maier, 1982). Hal ini menyebabkan analisis mengenai peran jumlah angkatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya mengkaji hubungan antara dua variabel secara parsial, sehingga belum mampu menjelaskan interaksi antara

kapasitas fiskal dan tenaga kerja secara simultan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan retribusi pasar, serta jumlah tenaga kerja dalam bentuk angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan periode waktu yang relatif panjang, yaitu tahun 2013–2025, serta mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada akhirnya, pentingnya penelitian ini didasarkan pada adanya dinamika pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, kesenjangan antar daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan kapasitas fiskal dan tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami hubungan antara unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, dan tenaga kerja secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2013–2025?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, dan tenaga kerja secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2013–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, dan tenaga kerja secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2013–2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, dan tenaga kerja secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2013–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari sisi teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

1.4.1 Manfaat Teori

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kapasitas fiskal daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi pasar, dan faktor produksi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai bagaimana perbedaan kemampuan fiskal daerah dan ketersediaan tenaga kerja dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota, khususnya dalam konteks Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai karakteristik dan variasi pertumbuhan ekonomi regional yang dipengaruhi oleh faktor fiskal dan sumber daya manusia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota dalam periode waktu yang relatif panjang, penelitian ini dapat

memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas atau variabel yang lebih beragam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi akademik dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi publik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa/i sebagai rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan yang memiliki keterkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tenaga kerja sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur empiris di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam kajian ekonomi regional dengan menggunakan pendekatan data panel, sehingga dapat mendorong pengembangan penelitian yang lebih mendalam, komprehensif, dan berbasis data.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan peran

pajak daerah, retribusi daerah, dan tenaga kerja. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya kontribusi dalam kegiatan ekonomi, baik melalui kepatuhan dalam membayar pajak maupun partisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran tenaga kerja dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

3. Bagi Mahasiswa/i

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang relevan dan aktual bagi mahasiswa/i dalam memahami metodologi penelitian kuantitatif, khususnya dalam penggunaan analisis data panel untuk mengkaji hubungan antar variabel ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa/i dalam memahami keterkaitan antara kapasitas fiskal daerah yang diwakili oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan retribusi pasar, serta faktor tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan tugas akhir atau penelitian selanjutnya, serta memberikan gambaran praktis mengenai penerapan teori ekonomi dalam analisis data empiris di tingkat daerah.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisis data, berpikir kritis, serta menyusun karya ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, penelitian ini juga memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh faktor kapasitas fiskal dan tenaga kerja. Proses penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam mengolah data ekonomi regional, menggunakan metode analisis kuantitatif, serta menginterpretasikan hasil penelitian secara objektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan keilmuan, tetapi juga meningkatkan kompetensi penulis dalam bidang penelitian dan analisis kebijakan ekonomi.